

PERAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN PENGAMBIL KEPUTUSAN SEKTOR PUBLIK: EKSPERIMEN PADA KONTEKS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

*Abdul Halim¹
Icuk Ranga Bawono²
Yudha Aryo Sudibyo³*

ABSTRACT

The purpose of this study are conducts test and extend Lipe and Salterio (2000); Dilla and Steinbart (2005) works in the public sector area. Two main problems of public sector in Indonesia are performance measurement and budget allocation plan made by decision makers such as member of the house of representatives is still not focus. In addition, research that examines the measurement of performance by using common and unique measures still have not found any conclusive results. Using both of the measures indicate will raised the accountability process in public sector (Ndlovu, 2010)

The design of this study using experimental methods, subjects in this research considered as knowledgeable or unknowledgeable decision maker. Subjects was 142 undergraduate accounting students, were in the 3rd year and already taking public sector accounting class. They will asked to role as a member of the local house of representatives (DPRD) and do the decisions of performance measurement and budget allocation plan for regional work units (SKPD) that is local government hospital (RSUD). Before the experiments conducts, a collection of experiments held the initial test case (pilot test) to determine the understanding of the case will be given. Hypotheses testing using ANOVA to determine differences between knowledgeable group and unknowledgeable.

The results showed that a knowledgeable group tended to use the information that is unique as a basis for performance measurement and budget allocation plans compared with the unknowledgeable group, it also showed that experience and knowledge will fullfill each other in decision making. This results are consistent with Lipe and Salterio (2000); Dilla and Steinbart (2005).

Keywords: *Accountability, Public Sector, Performance measurement, Budget allocation plan, Knowledgeable and Unknowledgeable, Decision Makers*

PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja organisasi telah menjadi penekanan utama untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Hampir semua organisasi baik sektor privat maupun sektor non

¹ Guru Besar Jurusan Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto/Mahasiswa Doktoral Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada

³ Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

profit/publik menjalankan mekanisme penilaian kinerja ini untuk menilai apakah organisasi telah berjalan pada jalur yang tepat, atukah perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerjanya. Pengukuran kinerja dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran tahun berikutnya apakah akan dilakukan revisi kenaikan atukah tetap menggunakan anggaran yang sama. Pengukuran kinerja pada mulanya banyak dilakukan secara sederhana (*traditional paradigm*) yaitu secara finansial melakukan perbandingan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Seiring dengan berjalannya waktu pengukuran kinerja secara tradisional (*traditional paradigm*) ini telah ditinggalkan di sektor privat. Sebagai penggantinya dikembangkan pengukuran kinerja yang sifatnya lebih komprehensif yang disebut sebagai *emerging paradigm* (Ndlovu, 2010).

Organisasi sektor publik menggunakan anggaran sebagai salah satu alat pengukuran kinerja. Anggaran dan realisasi anggaran pada tahun berjalan akan dilakukan pengukuran dan penilaian apakah sudah berjalan dengan baik (Peraturan Pemerintah No 71/2010). Pengukuran akan dilakukan dengan seksama oleh anggota dewan perwakilan rakyat (daerah) (DPR/DPRD) sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mewakili rakyat. DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai (Yudono, 2002)

Kritik dan perbaikan untuk merubah pengukuran kinerja yang sifatnya tradisional menuju ke arah pengukuran kinerja yang sifatnya *emerging* terus dilakukan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengukuran kinerja yang hanya menggunakan pengukuran umum tanpa memperhatikan pengukuran yang sifatnya unik yang terdapat dalam organisasi. Lipe dan Salterio (2000) melihat pemakaian ukuran-ukuran umum dan unik dalam penilaian kinerja yang dilakukan organisasi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui

bagaimana *Balanced Scorecard* (BSC) yang memiliki ukuran umum (*common*) dan ukuran unik (*unique*) bagi unit tertentu akan memengaruhi evaluasi pimpinan terhadap kinerja unit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dilla dan Steinbart (2005) menunjukkan bahwa pembuat keputusan yang telah memiliki pemahaman tentang BSC memakai kedua ukuran (umum dan unik) namun lebih menekankan pada ukuran umum. Hasil serupa juga ditemukan ketika eksperimen dilakukan pada kondisi pembuat keputusan tentang alokasi bonus.

Penelitian sejenis yang mendukung penelitian sebelumnya dikemukakan oleh Handoko dan Gudono (2006) dan Humphreys *et al.* (2008). Namun, beberapa penelitian memperlihatkan pertentangan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Murni dan Witono (2004) mengemukakan bahwa jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi parpol dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Roberts *et al.* (2004) mengemukakan bahwa dengan menggunakan metoda disagregasi-agregasi hasil evaluasi BSC dapat mengurangi bias ukuran umum (*common measure bias*) sehingga manajer tidak lagi mengabaikan ukuran kinerja yang bersifat unik dibandingkan dengan yang umum (bias ukuran umum).

Penelitian Libby *et al.* (2004) mengemukakan hasil yang mengejutkan dimana ketika manajer diharuskan untuk melakukan verifikasi laporan kinerja kepada atasan dan adanya jaminan dari pihak ketiga atas laporan BSC dapat meningkatkan penggunaan ukuran-ukuran unik dalam BSC, sehingga dikatakan bahwa kedua pendekatan ini dapat mengurangi bias ukuran umum. Penelitian Gagne *et al.* (2006) dalam penelitiannya ingin menunjukkan bahwa baik dimensi yang bersifat umum maupun unik sama-sama bermanfaat sebagai informasi dalam penilaian kinerja. Menggunakan metoda *post-experimental questionnaire* tidak ditemukan bukti bahwa subjek memberi bobot yang lebih rendah untuk dimensi yang bersifat

unik, hal ini menunjukkan bahwa subjek tidak mengabaikan informasi yang berasal dari pengukuran yang bersifat unik.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dikatakan sebagai organisasi sektor publik/non profit yang berbasis pada anggaran dalam pengukuran kinerjanya. Tidak hanya berpatokan pada anggaran, RSUD juga mempunyai berbagai macam perspektif pengukuran dalam menilai kinerjanya. Perspektif yang menjadi pengukuran dalam RSUD dapat dikatakan bervariasi terdiri dari pengukuran yang sifatnya umum dan unik. Perspektif finansial pada pengukuran kinerja rumah sakit dapat diukur dengan melakukan survei terhadap para pimpinan masing-masing Rumah Sakit (RS) mengenai kinerja keuangannya, penggunaan dana, perolehan pendapatan, pengeluaran dan kesesuaian dengan anggaran. Sedangkan perspektif berikutnya adalah pelanggan, dimana perspektif ini memperlihatkan cara pelanggan memandang organisasi dan bagaimana organisasi melihat pelanggannya. Sebagai ilustrasi, apabila dihubungkan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit pada perspektif pelanggan ini, harus dipertimbangkan antara lain: tindakan yang dilakukan agar pelanggan (pasien) puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan, penyelesaian dan tanggapan yang diberikan jika ada keluhan atau komplain dari pelanggan dan pemenuhan harapan pelanggan. Perspektif ini jika dilakukan dengan tepat dan baik, maka akan mendukung tercapainya kinerja keuangan.

Perspektif ketiga adalah proses internal, merupakan mekanisme/kerangka kerja dan alat untuk mengaitkan kepuasan pelanggan (pasien) dengan strategi alokasi sumber daya internal dan pengambilan keputusan dalam organisasi (Roberston, 2002). Proses ini dapat dievaluasi dengan serangkaian indikator. Sebagai contoh, apabila dilakukan dalam pengukuran kinerja kesehatan maka akan dilakukan survei kepada pasien mengenai proses administrasi dan pelayanan kesehatan, teknologi yang digunakan, sikap pegawai, komunikasi dengan pegawai, ketepatan waktu pelayanan kesehatan dan lain-lain. Perspektif ini mencakup indikator

kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu dan sebagainya. Indikator ini memungkinkan untuk mengetahui dan menentukan apakah proses telah mengalami peningkatan atau mencapai target sasaran.

Terakhir adalah aspek internal, dimana aspek ini melihat kemampuan pegawai, kualitas sistem informasi, teknologi proses, efek dari penyelarasan organisasi dalam menunjang pencapaian sasaran dan tujuan (Roberston, 2002). Proses ini dapat berhasil dengan baik jika ada informasi yang akurat dan tepat waktu. Perspektif ini memuat indikator tentang seberapa jauh manfaat dari pengembangan baru dan bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan.

Penjabaran diatas memperlihatkan masih belum fokusnya penelitian yang menyoroti mengenai pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan. Kedua, Selain dianggap lebih umum menggunakan konsep tradisional, organisasi nonprofit/sector publik di Indonesia belum memandang konsep pengukuran umum dan unik sebagai penekanan utama dalam penilaian kinerja organisasi.

Ketiga adalah konsep menghabiskan anggaran yang masih menjadi pertimbangan sektor nonprofit/publik terutama pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatannya sehingga dimungkinkan pengawasan, akuntabilitas, penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran menjadi bias (Coryanata, 2007).

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Pengukuran Kinerja

Secara umum kinerja memiliki pengertian capaian, hasil usaha, dan penyelesaian dari organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Setiap organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai dan adanya kinerja menunjukkan bahwa organisasi bergerak untuk mencapai tujuan

tersebut. Maka untuk mengetahui informasi tentang proses pencapaian tujuan maka dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan oleh organisasi sektor publik maupun organisasi sektor privat. Ritonga (2009) menjelaskan bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai suatu alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu dan kinerja pada organisasi lain.

2. Alasan Pengukuran Kinerja

Govindarajan (2007) mengatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi. Manajer sebuah organisasi akan memilih ukuran kinerja terbaik yang dapat menunjukkan strategi perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan jika terjadi peningkatan pada ukuran kinerja maka perusahaan telah berhasil mengimplementasikan strategi. Pengukuran kinerja akan meningkatkan kemungkinan organisasi untuk bisa mengimplementasikan strategi. Vitezec dan Knez-Riedl (2005) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dilakukan agar perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dan untuk menghindari risiko kegagalan akibat lingkungan bisnis yang berubah.

Menurut Mulyadi (1999) tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi perorangan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. Menurut Hyndman dan McGeugh (2006), dua alasan utama mengapa kinerja perlu diukur adalah pertama memberikan informasi untuk meningkatkan manajemen sektor publik dan kedua, menjadi bentuk dari akuntabilitas. Organisasi sektor publik seperti pemerintah menjalankan mekanisme penilaian kinerja untuk menilai apakah organisasi tersebut telah berjalan pada jalur yang tepat atau masih memerlukan perbaikan. Informasi

yang diperoleh dari penilaian kinerja akan bermanfaat bagi manajer untuk membuat berbagai macam keputusan.

Lebih detail lagi Behn (2003) memberikan penjelasan bahwa ada delapan tujuan manajer publik melakukan pengukuran kinerja. Pertama adalah untuk mengevaluasi, kedua adalah untuk mengendalikan, ketiga adalah untuk anggaran, keempat adalah untuk memotivasi, kelima adalah untuk mempromosikan, keenam adalah untuk merayakan, ketujuh adalah untuk pembelajaran dan kedelapan adalah untuk peningkatan.

3. Pengukuran Kinerja di Sektor Publik

Pengukuran kinerja di organisasi sektor publik seperti pemerintah dilakukan dengan cara sederhana yaitu membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Perbandingan ini akan menghasilkan angka persentase apakah telah terjadi efisiensi anggaran atau inefisiensi anggaran. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan paradigma tradisional.

Sektor publik mengenal adanya dua paradigma pengelolaan. Pertama, paradigma pengelolaan tradisional dan kedua adalah pengelolaan berbasis *New Public Management*. Kedua paradigma ini memiliki perbedaan pandangan dalam pengukuran kinerja di sektor publik. Pandangan tradisional memandang bahwa kinerja dilihat dari habis tidaknya suatu anggaran yang diajukan. Pandangan ini tidak mempertimbangkan *ouput* yang dihasilkan dari aktivitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja pada paradigma baru *New Public Management* tidak hanya berorientasi pada input atau pemakaian anggaran saja. Pandangan baru ini melihat kinerja secara komprehensif pada *input*, *output*, dan *outcome*. Untuk mengukur kinerja digunakan konsep *value for money* atau yang terdiri dari efisiensi, efektivitas dan ekonomi.

Pandangan serupa dengan *New Public Management* dikemukakan oleh Hyndman dan McGeugh (2006) yang menjelaskan bahwa kinerja sektor publik dilihat sebagai model

produksi sederhana yang terdiri dari tiga stase yaitu *input*, *output* dan hasil. Input adalah sumber daya yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa misal karyawan, uang dan peralatan. *Output* menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi (jumlah anak sekolah, banyaknya pembangunan jembatan, banyaknya rumah sakit). Hasil menunjukkan dampak dari barang atau jasa terhadap masyarakat misalnya adalah jalan yang nyaman, masyarakat yang sehat.

Masih dalam sumber yang sama Hyndman dan McGeugh membahas bahwa untuk menilai kinerja di sektor publik digunakan dua kriteria utama yaitu efisiensi dan efektivitas. Efektivitas memperhatikan hubungan antara *output* atau hasil dengan tujuan organisasi. Sebagai contoh misalkan target dari sebuah organisasi adalah untuk menurunkan angka kematian bayi sebanyak 10% dalam waktu setahun, ukuran keefektifan kinerja akan membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi adalah rasio *output* terhadap *input* atau jumlah input per unit dari *output*.

4. Rencana Alokasi Anggaran

Rencana alokasi anggaran adalah salah satu bagian dari penganggaran sektor publik. Rencana alokasi anggaran berisi rencana besarnya sumber daya yang akan digunakan pada suatu program atau unit organisasi berupa pelekatan angka-angka moneter ke dalam rencana kegiatan. Tahap pengalokasian merupakan tahap yang penting. Kesalahan dalam pengalokasian dapat berimbas kepada kegagalan suatu unit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembuat keputusan diharuskan benar-benar memikirkan dan memutuskan dengan benar alokasi anggaran yang akan dilakukan.

5. Proses Alokasi Anggaran

Pembuat keputusan menggunakan informasi kinerja untuk menentukan besarnya alokasi anggaran pada tahun mendatang. Setelah mengevaluasi kinerja dari suatu unit dan membuat penilaian, pembuat keputusan akan menggunakan penilaian untuk menentukan apakah alokasi anggaran di tahun mendatang akan dinaikan, diturunkan atau tetap.

Setelah sebuah unit organisasi melaksanakan semua aktivitasnya, maka akan dilakukan pengukuran kinerja untuk melihat sejauh mana capaian dari unit tersebut. Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan menggunakan ukuran umum atau ukuran unik. Pembuatan keputusan melakukan penilaian berdasarkan kedua ukuran tersebut dan kemudian mengambil kesimpulan apakah suatu unit telah baik kinerjanya. Baik-buruknya kinerja akan memengaruhi kebijakan dari alokasi anggaran. Konsep hubungan antara penilaian kinerja dan alokasi anggaran ditemukan dalam Anggaran Berbasis Kinerja.

6. Ukuran Umum dan Unik

Pengukuran kinerja di suatu organisasi terdapat dua jenis ukuran yaitu ukuran umum dan ukuran unik. Ukuran umum adalah ukuran yang dapat digunakan untuk banyak unit. Sedangkan ukuran unik adalah ukuran menunjukkan kinerja sebuah unit secara khusus. Konsep ukuran umum dan unik pada awalnya muncul dalam penyusunan *Balanced Scorecard*. Setiap unit dalam organisasi disarankan untuk mengembangkan dan memakai *scorecard*nya sendiri, memilih ukuran kinerja yang sesuai dengan strategi unit.

Ukuran umum lebih mudah digunakan dan lebih mudah dikenali dibandingkan dengan ukuran unik. Karena setiap unit meskipun berbeda memakai ukuran umum yang sama maka akan lebih mudah bagi pembuat keputusan untuk melakukan perbandingan antar unit. Lebih lanjut lagi, pembuat keputusan dapat membuat penilaian tentang baik buruknya kinerja

sebuah unit dengan memakai ukuran kinerja umum. Contoh ukuran umum adalah *return on sales*, pertumbuhan penjualan, tingkat kepuasan pelanggan dan laba bersih.

Ukuran unik dibuat sesuai dengan karakteristik bisnis dan strategi unit tertentu. Unit yang berbeda akan memiliki ukuran unik yang berbeda pula. Ukuran unik dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan strategi unit bisnis yang berbeda-beda antar unit.

7. Peningkatan Akuntabilitas

Akuntabilitas dikatakan sebagai kunci utama dalam administrasi publik dan selalu dikaitkan dengan demokrasi yang bersifat positif. Pengukuran kinerja juga dilakukan untuk tujuan akuntabilitas, demi tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*). Usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan organisasi sektor publik seperti organisasi pelayanan kesehatan yang dapat dipertanggungjawabkan dan transparan telah menjadi suatu keharusan dan menjadi tuntutan reformasi di Indonesia. Unsur-unsur *good governance* adalah keterbukaan (*transparency*), peningkatan efisiensi disegala bidang (*efficiency*), tanggung jawab yang lebih jelas (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan UNDP berpendapat unsur – unsur *good governance* adalah *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus of orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability* dan *strategic vision*. (Mardiasmo, 2002)

8. Pengembangan Hipotesis

Dilla dan Steinbart (2005) menyatakan bahwa penelitian psikologi dan perilaku konsumen tentang pengambilan keputusan dengan banyak atribut pengukuran menunjukkan bahwa pengambil keputusan memakai kedua jenis ukuran baik ukuran umum maupun ukuran unik. Namun lebih menekankan atau memberi bobot kepada ukuran umum. Penelitian dengan kesimpulan ini dilakukan oleh Slovic dan MacPhillamy (1974). Namun kesimpulan yang

lebih ekstrem dinyatakan dalam penelitian Lipe dan Salterio (2000) yang menyimpulkan bahwa pengambil keputusan secara total memakai ukuran umum dan tidak memperhatikan ukuran unik ketika menggunakan *Balanced Scorecard* untuk membuat evaluasi.

Analisis lebih lanjut oleh Dilla dan Steinbart (2005) menyebutkan bahwa perbedaan dalam tingkat kesulitan tugas dan pengetahuan partisipan membawa perbedaan hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Lipe dan Salterio (2000). Partisipan dalam penelitian Lipe dan Salterio (2000) memiliki sedikit pengalaman dalam penyusunan BSC. Pengambil keputusan yang berpengalaman dalam penyusunan BSC dan juga lebih terbiasa dengan pemakaian BSC akan diperkirakan berperilaku berbeda.

Dilla dan Steinbart (2005) menegaskan bahwa pembuat keputusan yang memahami teori dan juga struktur dari BSC mereka akan lebih mudah dalam menggunakan ukuran-ukuran umum dan unik. Pembuat keputusan juga akan lebih mudah membandingkan dan mengevaluasi kinerja setiap departemen. Penelitian di bidang pengauditan seperti yang disimpulkan oleh Bonner (1990) menyatakan bahwa lebih banyak pengetahuan akan membawa hasil pada kinerja pengambilan keputusan dalam penugasan audit.

Pengetahuan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan tentang alat ukur kinerja bisa diperoleh melalui pelatihan, kursus, buku, seminar dan jurnal-jurnal ilmiah. Dilla dan Steinbart berpendapat bahwa pembuat keputusan yang telah memperoleh pengetahuan tentang alat ukur kinerja akan membuat pembuat keputusan menggunakan secara penuh semua informasi baik ukuran umum dan unik untuk mengevaluasi kinerja dan alokasi kompensasi. Penjabaran diatas dapat diturunkan dalam hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Terdapat perbedaan penilaian pengukuran yang bersifat umum dan pengukuran yang bersifat unik terhadap pengambilan keputusan kinerja dan rencana alokasi anggaran tahun berikutnya.

Yudono (2002) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak – hak nya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Pengetahuan, diperlukan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pengetahuan dewan terhadap anggaran akan memengaruhi pengawasan keuangan daerah (Andriani, 2002; Sopanah, 2003; Weirmon, 2003; Coryanata, 2007; Winarna, 2007; Basri, 2007).

Perbedaan yang ada adalah tingkat pemahaman dan pengalaman tentang laporan kinerja. Ada pembuat keputusan di pemerintahan yang memang memiliki banyak pengalaman dan paham tentang laporan kinerja namun ada juga kurang pemahamannya. Pembuat keputusan yang berpengalaman akan lebih mengetahui dan memahami tentang laporan kinerja yang diterimanya. Sebaliknya ada juga pembuat keputusan yang kurang memiliki pengalaman dan pemahaman sehingga kurang memahami laporan kinerja.

Laporan kinerja yang diterima terdiri dari ukuran-ukuran kinerja umum dan ukuran-ukuran kinerja unik dari sebuah unit. Pembuat keputusan memperhatikan ukuran kinerja yang ada kemudian membuat kesimpulan tentang baik atau buruknya kinerja sebuah unit. Penelitian ini memperhatikan segi bagaimana pembuat keputusan menggunakan ukuran kinerja yang ada baik umum maupun khusus.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembuat keputusan yang memiliki pengalaman dengan laporan kinerja beserta ukuran kinerja umum dan unik menggunakan kedua jenis ukuran tersebut namun akan lebih memberikan penekanan pada ukuran-ukuran unik daripada ukuran-ukuran umum. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat keputusan tentang ukuran unik dan karakteristik unit bisnis tersebut. Pembuat keputusan akan memperhatikan bahwa ukuran unik memiliki

kelebihan karena mampu menunjukkan strategi unit pemerintahan. Kinerja unit pemerintahan akan lebih tercermin pada ukuran unik. Meskipun ukuran unik lebih kompleks dan lebih sulit untuk dievaluasi. Hal ini mengarahkan kepada hipotesis kedua dan ketiga:

H2 Terdapat perbedaan antara pengambil keputusan yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan dalam menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan pengukuran yang bersifat unik.

METODA PENELITIAN

1. Rancangan Eksperimen

Desain eksperimen digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola faktorial 2 x 2 *between-subject* dengan faktor penyajian jenis informasi (*common information* dan *unique information*) dan faktor pengetahuan (diberi pengetahuan dan tidak diberi pengetahuan). *Between-subject design* akan membandingkan pengaruh perlakuan yang berbeda pada subyek yang berbeda. Pemilihan metoda ini didasarkan pada alasan sebagai berikut (Nasution dan Supriyadi, 2007) (1) mampu menguji pengaruh interaksi dari variabel independen terhadap variabel dependen dan (2) menghindari terjadinya *demand effect*, yaitu subyek mengetahui arah dari *treatment* yang diberikan.

-----*Masukkan Gambar 1 kira-kira pada halaman ini*-----

2. Subyek

Subyek dalam penelitian adalah mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Subyek berjumlah 142 orang mahasiswa yang sedang menempuh tahun ketiga dan sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Subyek dalam penelitian ini diprosikan sebagai anggota dewan yang akan melakukan pengambilan keputusan terkait dengan pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran. Partisipan akan

menggunakan ukuran – ukuran yang ada dalam formulir – formulir khusus dalam eksperimen.

3. Desain Eksperimen

Kondisi perlakuan eksperimen untuk masing-masing kelompok *treatment* (diberi pengetahuan tentang pengukuran unik kinerja rumah sakit/berpengetahuan) dan kelompok kontrol (tidak diberikan pengetahuan/tidak berpengetahuan) ditunjukkan pada bagian desain eksperimen di bawah.

-----*Masukkan Tabel 1 kira-kira pada halaman ini*-----

4. Instrumen Penelitian

Eksperimen ini menggunakan media berupa formulir-formulir yang dirancang secara khusus untuk mempermudah subjek dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan. Instrumen utama dalam penelitian ini menggunakan simulasi kasus. Pengembangan kasus dilakukan dengan menyesuaikan penelitian terdahulu yang dilakukan Dilla dan Steinbart (2005) serta Lipe dan Salterio (2000) yang kemudian disesuaikan dengan konteks pada organisasi sektor publik/nonprofit dan kondisi di Indonesia. Instrumen penelitian telah dilakukan telaah oleh seorang dokter spesialis yang berkompeten dalam manajemen rumah sakit dan seorang direktur rumah sakit.

5. Prosedur Eksperimen

Model dan prosedur eksperimen ini dimodifikasi dari penelitian Dilla dan Steinbart (2005). Eksperimen dalam riset ini dilakukan dalam empat tahap, yaitu *pilot test* (uji pendahuluan), pelaksanaan eksperimen inti, cek manipulasi dan pengujian (demografi dan hasil eksperimen).

Tahap pertama, adalah pelaksanaan *pilot test* atau uji pendahuluan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa instrumen penelitian yang disusun dapat dioperasionalkan dan memiliki validitas internal yang baik. Jika instrumen penelitian mempunyai validitas dan reliabilitas yang baik maka instrumen tersebut dapat digunakan pada penelitian ini. Uji pendahuluan akan dilaksanakan dengan mengambil partisipan pada beberapa Mahasiswa Program Pascasarjana (Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen). Alasan pengambilan partisipan mahasiswa pascasarjana adalah mereka dianggap telah mempunyai dasar pengetahuan yang baik tentang pengambilan keputusan dalam organisasi dengan mempertimbangkan faktor finansial dan nonfinansial. Mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang telah selesai menempuh mata kuliah teori pada semester pertama dan kedua.

Tahap kedua, adalah pelaksanaan eksperimen inti. Subjek (kelompok Anggota Dewan dan kelompok mahasiswa) dibagi menjadi empat grup yang berbeda. Pada grup yang pertama dan kedua (grup A_1 dan A_2) yang menjadi grup berpengetahuan/*treatment group* diberikan pelatihan singkat tentang pengukuran kinerja umum (*common measurement*) dan pengukuran kinerja unik (*unique measurement*) selama satu jam. Pelatihan singkat ini berisikan materi sebagai berikut:

1. **Bagian pertama**, berisi penjelasan kinerja, definisi kinerja, pengukuran kinerja dan mengapa kinerja harus diukur, bagian ini akan diberikan sekitar 15 menit.
2. **Bagian kedua**, berisi penjelasan alokasi anggaran, definisi alokasi anggaran dan proses alokasi anggaran secara singkat, bagian ini akan diberikan sekitar 15 menit.
3. **Bagian ketiga**, berisi pemahaman singkat tentang cara membaca dan menginterpretasikan laporan keuangan RSUD yang berisikan beberapa informasi keuangan (*common measurement*) dan nonkeuangan (*unique measurement*) serta

memberikan penjelasan pentingnya pengukuran yang sifatnya unik dalam dasar penilaian kinerja. Bagian ini akan memakan waktu sedikit lebih lama dengan alokasi waktu 30 menit.

4. **Bagian keempat**, berisi pengendapan materi yang diberikan selama sekitar 10 menit. Proses pengendapan dimaksudkan agar pengetahuan yang diberikan dapat diserap lebih baik oleh subjek sehingga diharapkan dapat menghasilkan eksperimen yang baik.

Untuk mengurangi adanya bias dalam penelitian, maka rangkaian eksperimen terutama penjelasan dan pelatihan akan dilakukan dengan menggunakan protokol khusus, sedangkan pada grup ketiga dan keempat (B_1 dan B_2) yaitu grup tidak berpengetahuan, pelatihan singkat ini tidak diberikan. Keempat grup tersebut akan dilakukan eksperimen dalam empat sesi waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek interaksi dan efek pembelajaran antar subjek yang dapat mengganggu hasil eksperimen.

Lembar instrumen terdiri dari dua macam kasus yaitu Kasus RSUD A dan Kasus RSUD B. Pada Kasus **RSUD A** berisi dua jenis pengetahuan dengan lima jenis informasi umum yang berkaitan tentang Laporan Realisasi Anggaran RSUD A, yang terdiri dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (*common information*), sedangkan pada Kasus **RSUD B** berisi dua jenis pengetahuan dengan lima jenis informasi (dua jenis informasi umum dan tiga jenis informasi unik) tentang Laporan Realisasi Anggaran RSUD B, yang terdiri dari Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja (*common information*) dan pengetahuan tentang Rasio Kinerja RSUD B (*unique information*) yaitu *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Length of Stay* (LOS) dan *Bed Turn Over* (BTO) yang akan secara lebih lengkap disajikan dalam Kasus RSUD A dan RSUD B

Subyek pada tiap grup diminta untuk membaca dan menelaah informasi yang berkaitan dengan kinerja **RSUD A** dan **RSUD B** (grup A dan grup B) yang disajikan dalam instrumen tersebut. Setelah subjek membaca informasi mengenai kinerja rumah sakit yang didapatkan dari kasus, kemudian subjek diminta untuk memberikan penilaian tentang kinerja rumah sakit dan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Penilaian subjek mengenai kinerja rumah sakit akan menjadi dasar dalam memberikan keputusan untuk menaikkan atau tidak menaikkan anggaran RSUD untuk periode tahun 2010 yang terdapat dalam bagian akhir skenario kasus. Subjek diberi waktu maksimal 30 menit untuk memberikan keputusan yang berkaitan dengan penganggaran rumah sakit.

Tahap ketiga, Pada tahapan ini akan dilakukan cek manipulasi untuk mengetahui dua hal. Pertama, apakah subjek memahami formulir-formulir khusus yang diberikan kepada mereka dan kedua, untuk mengetahui apakah subjek memahami mengenai tugas yang diberikan kepada mereka sesuai dengan instruksi yang diberikan. Cek manipulasi akan diberikan dalam bentuk kuesioner singkat yang berisi sepuluh pertanyaan.

Tahap keempat, tahapan ini akan berisi pengujian (demografi). Pengujian demografi dimaksudkan untuk memperoleh data demografi dan data tambahan lainnya yang berkaitan dengan subjek. Karakteristik demografi partisipan eksperimen terdiri atas lima bagian utama yaitu jenis kelamin, umur dan jenjang pendidikan, sedangkan pengujian hasil eksperimen adalah pengujian terhadap data yang dikumpulkan selama proses eksperimen dilakukan

Tahap kelima, tahapan ini akan dilakukan pengumpulan formulir – formulir khusus yang sebelumnya telah dibagikan kepada subyek dan melakukan pemilahan sesuai dengan subyek dan tugas yang diberikan

-----*Masukkan gambar 2 kira-kira pada halaman ini*-----

6. Pengujian Hipotesis

Pada **hipotesis pertama (H1)**, dilakukan pengujian dengan membandingkan keputusan subyek dalam menilai pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran tahun berikutnya RSUD pada *treatment group* dan *control group*. Penyajian sifat informasi umum dan unik memberikan penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran yang berbeda. Hasil uji ANOVA menunjukkan perbedaan sifat informasi terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 5.742 dan signifikan pada $p=0.018$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

Pada **hipotesis kedua (H2)**, pengujian yang dilakukan adalah membandingkan keputusan subyek dalam membuat keputusan alokasi anggaran pada *treatment group* dan *control group*. Kelompok yang memiliki pengetahuan seharusnya menghasilkan keputusan yang berbeda dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan. Hasil uji ANOVA menunjukkan perbedaan pelatihan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 26.174 dan signifikan pada $p=0.000$ dengan tingkat kepercayaan 95%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 2 menunjukkan statistik demografi responden yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok perlakuan, yaitu kelompok *treatment* dan kontrol yang memiliki latar belakang yang relatif homogen.

-----*Masukkan tabel 2 kira-kira pada halaman ini*-----

2. Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama (H1) yang diujikan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan keputusan subyek dalam menilai pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran tahun

berikutnya RSUD pada kelompok *treatment* dan kontrol. Penyajian sifat informasi umum dan unik memberikan penilaian kinerja dan rencana alokasi anggaran yang berbeda.

-----*Masukkan tabel 3 kira-kira pada halaman ini*-----

Hasil pengujian pada tabel 3 menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini terdukung secara statistis dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95%.

Hipotesis kedua (H2) adalah membandingkan keputusan subyek dalam membuat keputusan pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran tahun berikutnya pada *treatment group* dan *control group*. Kelompok yang memiliki pengetahuan akan menghasilkan keputusan yang berbeda dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan, dan perbedaan ini teruji signifikan secara statistik.

-----*Masukkan tabel 4 kira-kira pada halaman ini*-----

Hasil pengujian pada tabel 4 menunjukkan bahwa hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini terdukung secara statistis dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95%.

3. Pembahasan

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Lipe dan Salterio (2000); Dilla dan Steinbart (2005) hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan kelompok yang diberikan pengetahuan memberikan penilaian kinerja RSUD yang berbeda dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan atau dengan kata lain Hipotesis pertama (H1) terdukung secara statistik. Kondisi ini ditunjukkan dengan hasil uji ANOVA menunjukkan pengaruh perbedaan sifat informasi terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 5.742 dan signifikan pada $p=0.018$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat perbedaan pengambilan keputusan subyek terhadap informasi

yang bersifat unik (menilai kinerja rumah sakit lebih rendah) dibandingkan dengan informasi yang bersifat umum (menilai kinerja rumah sakit lebih tinggi).

Demikian pula dengan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan konsistensi penelitian Lipe dan Salterio (2000); Dilla dan Steinbart (2005) dimana hasil uji ANOVA menunjukkan adanya pengaruh perbedaan pelatihan terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 26.174 dan signifikan pada $p=0.000$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti kelompok yang diberikan pengetahuan menghasilkan keputusan yang berbeda dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan pengetahuan dalam pembuatan keputusan pengukuran kinerja dan rencana alokasi anggaran tahun berikutnya, atau dapat dikatakan H2 terdukung secara statistik. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kelompok yang diberikan pengetahuan akan menggunakan informasi yang bersifat unik sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang pengalokasian anggaran rumah sakit untuk tahun anggaran berikutnya. Sehingga dapat diartikan bahwa kelompok yang diberikan pengetahuan menilai kinerja rumah sakit kurang baik sehingga mereka membuat keputusan alokasi anggaran yang lebih kecil dibandingkan kelompok tidak diberikan pengetahuan. Hasil penelitian ini menunjang temuan Lipe dan Salterio (2000) yang selanjutnya dikembangkan oleh Dilla dan Steinbart (2005) bahwa pengetahuan akan menyebabkan perbedaan keputusan.

Pengujian tambahan juga dilakukan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan uji kovariat terhadap gender subyek pengambil keputusan. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan Hasil uji ANOVA gender terhadap pengambilan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F sebesar 3.859 dan signifikan pada $p=0.051$ dengan tingkat kepercayaan 90%.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

1. Penyajian dan penggunaan informasi akan berbeda antar kelompok subyek sehingga informasi yang bersifat umum dan unik akan dinilai berbeda oleh kelompok subyek dalam menilai kinerja rumah sakit dan rencana alokasi anggaran.
2. Kelompok yang diberikan pengetahuan cenderung menggunakan informasi yang bersifat unik sebagai dasar dalam membuat keputusan tentang rencana alokasi anggaran rumah sakit tahun berikutnya, sedangkan kelompok yang tidak diberikan pengetahuan cenderung menggunakan informasi yang bersifat umum sebagai dasar dalam membuat keputusan.
3. Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan subyek mahasiswa yang diprosikan sebagai anggota dewan yang mungkin saja mempunyai bias dibandingkan bila menggunakan subyek yang sesungguhnya, Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subyek nyata dan menggunakan metoda eksperimen *between-within subject* untuk dapat menguji antara kelompok berpengetahuan dan tidak berpengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

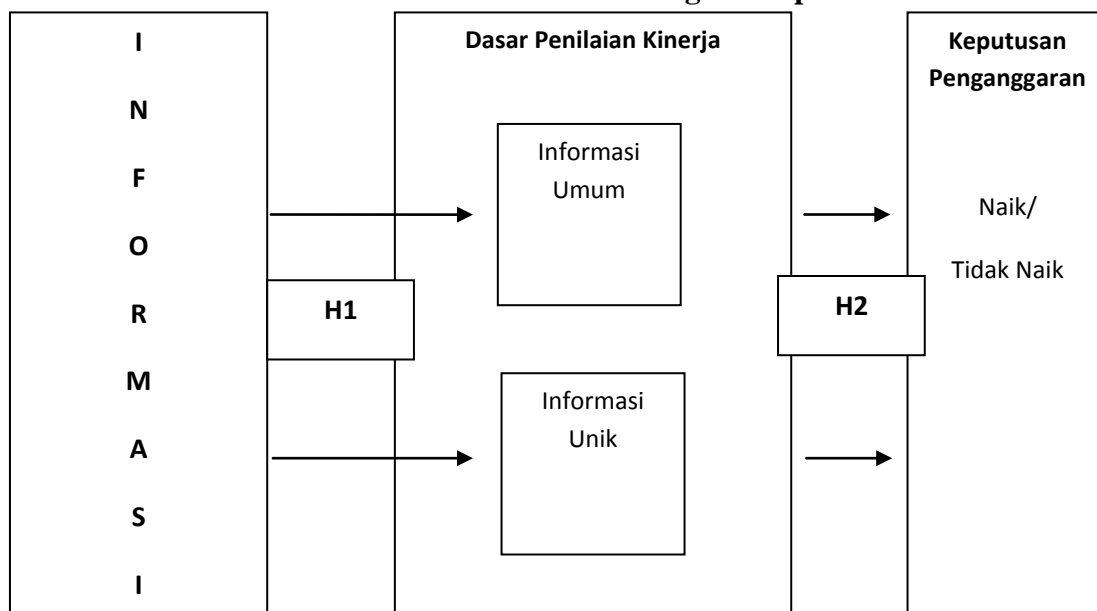
- Basri, Mutia Yesi, 2007. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Pada Pengawasan Keuangan Daerah, *Jurnal Ilmu administrasi Negara*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2008, 29-39
- Bonner, S.E. 1990. Experience Effect in Auditing: The Role of Task-Specific Knowledge. *The Accounting Review*. Vol 65. Page 72-92.
- Behn, Robert D. 2003. Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*. September/October. Vol 63. No 5.
- Coryanata, Isma. 2007, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. Artikel, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar.
- Cumby, Judy., Conrod, Juan. 2001. "Non-Financial Performance Measures in The Canadian Biotechnology Industry". *Journal of Intellectual Capital*, Vol 3, No 2, pp 261-276.

- Dilla, William N. and Steinbart, Paul John. 2005. Relative Weighting of Common and Unique Balanced Scorecard Measures by Knowledgeable Decision Makers. *Behavioral Research in Accounting: 2005, 17, ABI/INFORM Global Pg. 53*
- Gagne, Margaret I; Joan Holister; Gregory J. Tully. 2006. "Using the Balanced Scorecard: Both Common and Unique Measure Are Informative". *Journal of Applied Business Research*.
- Govindarajan, Vijay. 2007. *Management Control System*. 12th edition. McGraw Hill: New York
- Handoko, Jesica dan Gudono. 2006. "The Effect of Cognitive and Affective Aspects in Decision Making Using Balanced Scorecard". *JRAI Vol 9, No.3*.
- Humphreys, Kerry A; Trotman, Ken T. 2008. "The Balanced Scorecard: The Effect of Strategy Map Provision on Performance Evaluation Judgements and Mental Model Development". *Australian School of Business University of New South Wales*.
- Hyndman, Noel and McGeough, Francis. 2006. NPM and Performance Measurement: A Comparative Study of Public Sectors in Ireland and The UK. *Irish Accounting Review*
- Habbe, Abdul Hamid. 2006. Pengujian Heuristic Representativeness dan Anchoring-Adjustment Atas Perilaku Over/Underreaction Investor Terhadap Informasi Laba dan Konsekuensinya Pada Prediksi Laba dan Penilaian Saham. Disertasi Tidak Dipublikasikan.
- Libby, Theresa, Steven E. Salterio, Alan Webb. 2004. "The Balanced Scorecard: The Effects of Assurance and Process Accountability on Managerial Judgement". *The Accounting Review*.
- Lipe, Marlys Gascho and Salterio, Steven E. 2000. The Balanced Scorecard: Judgmental Effect of Common and Unique Performance Measures. *The Accounting Review, Vol 75, No 3 (July 2000) pp. 283-298*
- Mardiasmo, 2002. Serial Otonomi Daerah: *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mulyadi dan Setyawan, Johnny. 1999. Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Manajemen. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution, Damai dan Supriyadi. 2007. Pengaruh Urutan Bukti, Gaya Kognitif, dan Personalitas terhadap Proses Revisi Keyakinan. Simposium Nasional Akuntansi X Juli 2007

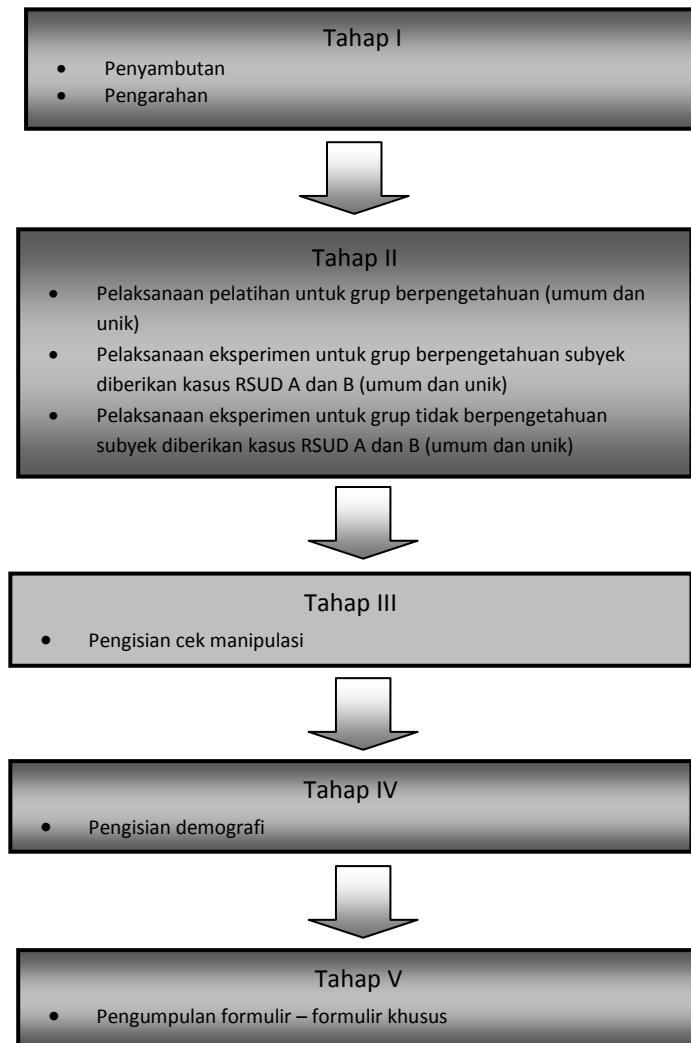
- Ndlovu, Stephen. 2010. Non-Financial Performance Measures Within Public Companies – A Literature Review. *Advance in Accounting, Finance, and Economics Vol 3, No. 1 Summer 2010*
- Ritonga, Irwan Taufik. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UGM: Yogyakarta
- Roberstone, G. 2002. “Lokakarya Review Kinerja Pemerintah” *Makalah*.
- Slovic, P. and MacPhillamy. 1974. Dimensional Commensurability and Cue Utilization in Comparative Judgment. *Organizational Behaviour and Human Performance*. Vol. 11 Page 172-194.
- Sopannah, 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Tesis Yogyakarta, Program Pascasarjana, UGM
- Vitezic, Neda and Knez-Riedl, Jozica. 2005. The Use of Financial and Non-Financial Measures in Decision-Making Process of Enterprises Performance in Transition Economy. *Sixth International Conference on Enterprise in Transition*.
- Werimon, Simson, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah, Artikel, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar
- Winarna, Jaka dan Murni, 2007. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, Simposium Nasional Akuntansi 10, Makassar.
- Yudono, Bambang. 2002. “Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm. Diakses November 2011.

LAMPIRAN

Gambar 1. Alur Pemikiran Rancangan Eksperimen



Gambar 2. Bagan Tahapan Pelaksanaan Eksperimen



Tabel 1 Desain eksperimen

| | Berpengetahuan | Tidak Berpengetahuan |
|----------------|----------------|----------------------|
| Informasi Umum | Grup A1 | Grup B2 |
| Informasi Unik | Grup A2 | Grup B1 |

Tabel 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Group | | Total |
|---------------|-----------|---------|-------|
| | Treatment | Control | |
| Pria | 23 | 33 | 56 |
| Wanita | 46 | 40 | 86 |
| Total | 69 | 73 | 142 |

Tabel 3. Pengujian Hipotesis 1

| Between-Subjects Factors | | | |
|--------------------------|---|-------------|----|
| | | Value Label | N |
| Informasi | 1 | Umum | 71 |
| | 2 | Unik | 71 |

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Keputusan

| Source | Type III Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|-----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | 2.817 ^a | 1 | 2.817 | 5.742 | .018 |
| Intercept | 892.507 | 1 | 892.507 | 1.819E3 | .000 |
| Informasi | 2.817 | 1 | 2.817 | 5.742 | .018 |
| Error | 68.676 | 140 | .491 | | |
| Total | 964.000 | 142 | | | |
| Corrected Total | 71.493 | 141 | | | |

a. R Squared = .039 (Adjusted R Squared = .033)

Tabel 4. Pengujian Hipotesis 2

| Between-Subjects Factors | | | |
|--------------------------|---|-----------------|----|
| | | Value Label | N |
| Pelatihan | 1 | Pelatihan | 69 |
| | 2 | Tidak Pelatihan | 73 |

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable:Keputusan

| Source | Type III Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|-----------------|-------------------------|-----|-------------|---------|------|
| Corrected Model | 11.261 ^a | 1 | 11.261 | 26.174 | .000 |
| Intercept | 886.162 | 1 | 886.162 | 2.060E3 | .000 |
| Pelatihan | 11.261 | 1 | 11.261 | 26.174 | .000 |
| Error | 60.232 | 140 | .430 | | |
| Total | 964.000 | 142 | | | |
| Corrected Total | 71.493 | 141 | | | |

a. R Squared = .158 (Adjusted R Squared = .151)

CV DAN SURAT PERNYATAAN

Kami penulis artikel dengan identitas sebagai berikut :

Nama Penulis Pertama : Prof. Dr. Abdul Halim, MBA, Ak
Nama Penulis Kedua : Ickuk Rangga Bawono, SH, SE, M.Si, MH, Ak
Nam Penulis Ketiga : Yudha Aryo Sudibyoy, SE, M.Sc, Ak
Judul Artikel : **PERAN INFORMASI DAN PENGETAHUAN
PENGAMBIL KEPUTUSAN SEKTOR PUBLIK:
EKSPERIMEN PADA KONTEKS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD)**

Menyatakan bahwa artikel kami adalah bersifat asli dan orisinal serta belum pernah dimasukan, diajukan atau pun akan diterbitkan dalam jurnal lain. Penerbitan artikel kami akan dilakukan melalui proses pernyataan tertulis dari kami dan telah dibubuhi tanda tangan sebagai persetujuan.

Yogyakarta, 29 Juni 2012
Yang Membuat Pernyataan,



Ickuk Rangga Bawono, SH, SE, M.Si, MH, Ak

Penulis Kedua